

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# 53.000 Penerima KJP Dicopot

## Palmerah, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mencoret 53.000 penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dinilai tak layak lagi menerima bantuan pendidikan tersebut.

Hal ini diungkapkan Pelaksana teknis (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin berdasarkan hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dirampungkan pihaknya.

"Pada gelombang dua ini menyisakan 130.000 orang dan yang kami setuju memang layak menerima KJP Plus ada 77.000-an, serta 53.000-an itu kami anggap tidak layak untuk mendapatkan," ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (14/7/2024).

Untuk tahap kedua gelombang pertama,

Budi menambahkan, ada ratusan ribu penerima manfaat yang akan terlebih dulu diverifikasi ulang.

"Tahap dua nanti, totalnya gelombang pertama sekira 533.000-an," ujarnya.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini menjelaskan, proses verifikasi dan validasi data bakal terus dilakukan guna memastikan bantuan KJP Plus tepat sasaran.

Tim gabungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Sosial (Dinsos) pun bakal dikerahkan untuk melakukan proses verifikasi.

"Program KJP Plus sifatnya dinamis menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat, sehingga jumlah penerima bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diupdate secara berkala," tuturnya.

Ia pun berharap, bantuan KJP Plus dapat digunakan sebaik mungkin oleh para penerima manfaat. "Kami berharap agar bantuan sosial KJP Plus dapat meningkatkan kualitas SDM, khususnya warga Jakarta. Sebab dengan SDM unggul maka harkat martabat bangsa bisa terangkat untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata dia.

## Gratisan sekolah swasta

Sebelumnya Komisi E DPRD DKI Jakarta

akan terus mendorong realisasi program sekolah gratis, baik negeri maupun swasta. Terlebih lagi, setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyatakan, program pendidikan gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI. Kata dia, pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) tertulis 'Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Lalu di Pasal 16 huruf (f) berbunyi 'Pemerintah daerah wajib menyediakan dana

guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar'.

"Sudah sebagai kebutuhan mendesak untuk merealisasikan sekolah gratis, sehingga wajib belajar 12 tahun bukan hanya sekadar jargon," kata Jhonny pada Kamis (11/7/2024).

Jhonny berharap, Pemprov DKI bisa merealisasikan usulan DPRD pada 2025 mendatang, agar seluruh anak Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang layak, baik di sekolah negeri maupun swasta tanpa biaya alias gratis.

Bahkan, diiringi dengan kualitas pengajar serta sarana dan prasarana yang mumpuni. (faf/TribunJakarta)